

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasaman dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 55 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasaman.

B. Gambaran Umum Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasaman

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 55 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Serta Uraian Tugas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasaman menjelaskan bahwa susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:

- a. Kepala.
- b. Sekretariat.
- c. Bidang Mutasi Kepegawaian.
- d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan.
- e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- f. Bidang Dokumentasi dan Kesejahteraan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

2. Tugas Poko dan Fungsi

Tugas Pokok dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasaman adalah : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan pegawai

Fungsi : Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan (diklat) pegawai;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang urusan kepegawaian daerah dan diklat pegawai;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian daerah dan diklat pegawai;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kepegawaian Daerah terdapat pegawai sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016

No	Nama	TTL	NIP	Gol/ Pangkat	Pendidikan	Diklat Yang Pernah Diikuti
A	STRUKTURAL					
I	SEKRETARIAT					
1	Drs. HASIHOLAN HUTAGALUNG		196607041994031013	IV/b/Pembina Tk.I	S1 Fisipol	PIM II 2006
2	ANAS		196108061986031006	III/d/Penata Tingkat I	SLTA 1981	SEPADA 1994
3	IRMA, ST		197807272006042002	III/c/Penata	S1 Teknik Sipil 2001	
4	RENI YULIA,SE		198308272008012003	III/b/Penata Muda Tk. I	S1 Ekonomi 2008	
5	Drs. MARJOHAN,MM		196002011992021002	IV/b/Pembina Tk.I	S2 2005	SPAMA
6	EMDISON, S.Pd,MM		196312311998031082	IV/b/Pembina Tk.I	S2 Manajemen 2005	PIM III 2014
7	Drs. DEAS KHAIRNALIM		1965031992031005	IV/b/Pembina Tk.I	S1 Administrasi 1990	PIM III 2010
8	MHD. ALI HANAFIAH,S.Pd		196412121989031010	IV/a/Pembina		
9	YOSIE HOLENSIA.D, SE		198309072007012003	III/b/Penata Muda Tk.I	S1 Manajemen 2005	-
10	VENI TRI OKVANITA,SE		198510262005012004	III/b/Penata Muda Tk.I	S1 Manajemen 2009	-
11	MARJUNISON		197303052007011012	II/c/Pengatur	SLTA 1992	-
12	ROZIA ANUM		198210072007012004	II/c/Pengatur	SLTA 2001	-
13	YASRIL.R		196404192007011003	II/b/Pengatur Muda Tk.I	SLTA 1985	-
14	RISMAN		196801172009011002	II/b/Pengatur Muda Tk.I	SLTA 1988	-

15	IBRAHIM		197707112006041008	II/b/Pengatur Muda Tk.I	SLTA 2005	-
16	HASMIDAR		196205152012122001	I/c/Juru	Paket B	-
II BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN						
17	NULFIKAR, S.Ag		196204301983031003	IV/a/Pembina	S1 Agama 1996	PIM III 2010
18	EDWARD, SH		197206151997031006	III/d/Penata Tingkat I	S1 Hukum 2002	PIM IV 2012
19	MARTA YANDRA, S.Kom		197904022005011004	III/d/Penata Tingkat I	S1 Komputer 2003	PIM IV 2016
20	SYACHOIRANI, S.Kom		198103032009012007	III/b/Penata Muda Tk. I	S1 Komputer	
21	DESSY SUSIYANTI, SE		197607182006042003	III/b/Penata Muda Tk. I	S1 Manajemen 2010	-
22	HENDRIZAL, SH		198212202007011004	III/a/Penata Muda	S1 Hukum 2013	-
23	TRIAS INERDA PUTRI, A.Md			-	-	-
III BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN						
24	ASRIAL, SH		196808261989031004	III/d/Penata Tingkat I	S1 Hukum 2014	ADUM 1999
25	JONNIZAR, SH		196106201987031003	III/d/Penata Tingkat I	S1 Hukum 2002	ADUM 1999
26	DIKRI YENNI, SH		196508251993082001	III/d/Penata Tingkat I	S1 Hukum 1991	ADUM 1998
27	RAFNINELI, S.IP, M.Si		196806111993032011	IV/a/Pembina	S2 Manajemen 2005	PIM III 2013
28	IRMAWATI, S.Kom		197908112006042007	III/c/Penata	S1 Komputer 2005	-
29	INDRA BASTIAN, SH		197705172007011004	III/a/Penata Muda	S1 Hukum 2011	-
30	PRIGUS ELFIDA, S. Psi		198408122015032002	III/a/Penata Muda	S1 Psikologi 2006	-
31	YURITA SUSANTI, S.Pd		198506262015032003	III/a/Penata Muda	S1 Pend. Biologi 2012	-
32	FINA ANDRIANI, S.STP		199207282014062001	III/a/Penata Muda	S1	
IV BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
33	DRS. MUSTAYARDI		195908041989031006	IV/b/Pembina Tk.I	S1 IAIN 1988	PIM III 2005
34	NIKMATUSSADISAH, SH, MH		196806031998032003	IV/a/Pembina	S2 Hukum 2012	PIM IV 2004
35	ALI AMRAN AL		1959052619820111001	III/d/Penata Tingkat I	SLTA 1984	-
36	YUTRIANE YUSHIR, SE, Akt, MM		197203231997012001	IV/a/Pembina	S2 Manajemen 2005	PIM III 2010
37	DEFI MULYANI, SH		198108312008012002	III/a/Penata Muda	S1 Ilmu Hukum 2014	-
V BIDANG DOKUMENTASI DAN DATA						
38	JONI HAFIZAL, SH		196411071986021002	III/d/Penata Tingkat I	S1 Hukum 2002	ADUM 1999
39	ENDANG		195903011981012001	III/d/Penata Tingkat I	SMKK 1980	-

40	ABDUL MUHIR,SH		197904102000031004	III/d/Penata Tingkat I	S1 Hukum 2005	PIM IV 2013
41	ELVA VERA, SH		1971091720072004	III/b/Penata Muda Tk. I	S1 Hukum 2011	-
42	JUPRIAL, A.Md		198510112011011008	II/d/Pengatur Tk.I	D3 T.Komputer 2009	-
43	SURYADI		198312282010011006	II/b/Pengatur Muda Tk.I	SLTA 2002	-
B	FUNGSIONAL					
	-					

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

A. Visi dan Misi

Dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pasaman dan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, kekuatan dan kelemahan, tantangan dan peluang yang ada serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 adalah "MEWUJUDKAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH SEBAGAI PENUNJANG KEBERHASILAN PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MELALUI KEPEGAWAIAN YANG PROFESIONAL DAN BERKUALITAS"

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah misi Badan Kepegawaian Daerah yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana. Lebih jauh dengan mempertimbangkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi, siapa yang memiliki kebutuhan dan bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut, maka misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan manajemen kepegawaian dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan.
- b. Meningkatkan aparatur pemerintah terhadap peraturan yang berlaku serta kebijakan, instruksi yang ditetapkan.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen Sumber Daya Aparatur.

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat yang menginginkan pelayanan yang lebih baik dari aparatur pemerintah. Untuk itu diperlukan aparatur yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan tersebut dijadikan misi yang hendak dicapai dan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah dengan mengimplementasikannya pada segenap jajaran aparatur Pemerintah dan melalui pemberian pelayanan yang prima pada masyarakat.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Setelah visi dan misi ditetapkan maka strategi dan kebijakan yang ditempuh yaitu:

1. Strategi yang pertama adalah meningkatkan disiplin aparatur melalui kebijakan menciptakan tata kelola pemerintahan melalui pengawasan yang handal dan berkualitas
2. Strategi yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan dan karir aparatur dengan kebijakannya sebagai berikut:
 - a) Menciptakan aparatur yang berkualitas, berkompeten dan berintegritas
 - b) Menciptakan tata kelola pemerintahan melalui pengawasan yang handal dan berkualitas
 - c) Menerapkan reward dan punishment bagi aparatur

3. Strategi yang ketiga adalah Meningkatkan pengelolaan aparatur dengan kebijakan sebagai berikut:
 - a) Menciptakan aparatur yang berkualitas, berkompeten dan berintegritas
 - b) Menciptakan tata kelola pemerintahan melalui pengawasan yang handal dan berkualitas
 - c) Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi

C. Prioritas Daerah

Prioritas daerah Badan Kepegawaian Daerah dijabarkan dalam 7 (tujuh) program dan terurai dalam 22 (dua puluh dua) kegiatan yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1
 - a) Kegiatan 1 Administrasi Perkantoran
 - b) Kegiatan 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
 - c) Kegiatan 3 Rapat dan Koordinasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2
 - a) Kegiatan 1 Pengadaan Peralatan dan Mesin
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3
 - a) Kegiatan 1 Pengadaan Pakaian Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4
 - a) Kegiatan 1 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah
 - b) Kegiatan 2 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi PNS Daerah
5. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5
 - a) Kegiatan 1 Penyusunan Laporan SKPD
6. Program Pendidikan Kedinasan 6
 - a) Kegiatan 1 Pendidikan Penjenjangan Struktura
7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 7
 - a) Kegiatan 1 Seleksi Penerimaan CPNS
 - b) Kegiatan 2 Penempatan PNS
 - c) Kegiatan 3 Pembangunan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
 - d) Kegiatan 4 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
 - e) Kegiatan 5 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
 - f) Kegiatan 6 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS
 - g) Kegiatan 7 Analisis Kebutuhan PNS Berdasarkan Beban Kerja
 - h) Kegiatan 8 Seleksi PNS Berprestasi dan Pengambilan Sumpah PNS
 - i) Kegiatan 9 Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pegawai
 - j) Kegiatan 10 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Kenaikan Tingkat PNS
 - k) Kegiatan 11 Pengelolaan Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu Suami dan Kartu Taspen
 - l) Kegiatan 12 Penelitian kelengkapan dokumen PNS pindah masuk
 - m) Kegiatan 13 Penataan dokumen CPNS

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Pengelolaan Pendapatan

1. Target dan Realisasi

a) Belanja Tidak Langsung

- Target = Rp. nihil
- Realisasi = Rp. nihil

b) Belanja Langsung

- Target = Rp. nihil
- Realisasi = Rp. nihil
- Sisa Lebih = Rp. Nihil

2. Permasalahan dan solusi (nihil)

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Target dan Realisasi

a) Belanja Tidak Langsung

- Alokasi Anggaran Rp. 3.674.697.085,-
- Realisasi Anggaran Rp. 2.997.276.668,-
- Sisa Lebih Anggaran Rp. 677.420.417,-

b) Belanja Langsung

- Alokasi Anggaran Rp. 3.644.330.300,-
- Realisasi Anggaran Rp. 1.642.312.214,-
- Sisa Lebih Anggaran Rp. 2.002.018.086,-

2. Permasalahan dan solusi.....

